

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai lembaga sektor publik bertugas melayani masyarakat dan berperan sebagai mesin pembangunan daerah yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah wajib menghasilkan laporan keuangan yang tersedia bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan sistem informasi interaktif. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan, pemerintah harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk memfasilitasi pengelolaan fungsinya. Pengelolaan data keuangan yang efektif dan efisien memerlukan suatu sistem informasi terpadu yang dapat diandalkan secara cepat dan akurat agar sistem tersebut dapat terintegrasi sepenuhnya dan menyampaikan informasi yang andal dan relevan. Hal ini penting mengingat volume anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin meningkat. Peningkatan volume transaksi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas keuangan negara, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas dan memanfaatkan kapasitas keuangan yang ada (Fatikhah, 2022).

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan anggaran negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang andal, yaitu suatu sistem yang mampu

mengolah data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan (BPKP, 2023). Sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 penyajian laporan keuangan tahunan meliputi LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa segala bentuk pendapatan dan belanja daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemanfaatan sumber daya anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran secara maksimal diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja SKPD dapat diukur dari seberapa tinggi pemanfaatan anggaran SKPD tersebut.

Sumber daya keuangan negara yang terbatas harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung inisiatif strategis melalui alokasi anggaran yang efektif. Keterbataasan sumber daya memaksa pemerintah untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan dana secara cerdas. Kegagalan untuk mematuhi anggaran dapat menyebabkan ketidakefektifan alokasi sumber daya. Selain itu, juga harus diperiksa apakah tujuan awal penggunaan dana telah tercapai atau belum sehingga penilaian penggunaan dana dapat dilakukan secara proporsional. Pencapaian keluaran dan hasil harus dipertimbangkan dalam ukuran kinerja yang diperiksa (Imantoro, 2011).

Pada tahun 2022 Pengelolaan Anggaran daerah diubah menjadi digitalisasi yaitu berupa SIMDA FMIS berbasis internet yang dikembangkan oleh BPKP. Peralihan ini didasari oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengubah paradigma pengelolaan anggaran daerah dan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Pengelolaan Anggaran Daerah. SIMDA FMIS telah diterapkan di salah satu SKPD di Kabupaten Tegal, termasuk di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Sebelumnya, Sekretariat DPRD menggunakan SIMDA Keuangan untuk pengelolaan anggaran yang belum terintegrasi dalam proses transaksi keuangan dan penjurnalan otomatis. Artinya, tidak semua transaksi keuangan dapat dilihat secara langsung di jurnal atau transaksi, dan SIMDA Keuangan tidak terhubung dengan *website*, sehingga karena keterbatasan fungsinya, kurang transparan dan akuntabilitas sehingga anggaran tidak dapat dilaksanakan secara efisien. Mengingat pentingnya administrasi yang bersih dan baik di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Selain berbasis *website*, SIMDA FMIS juga mengintegrasikan SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan, serta menawarkan keunggulan dalam hal akses dan integrasi. Penelitian ini mengkaji permasalahan keterlambatan pelaksanaan anggaran yang disebabkan oleh

penyesuaian sistem SIMDA FMIS baru yang belum terintegrasi dengan program SIMDA lama karena berbasis *website*, karena berbasis *website*. BPKP mengembangkan SIMDA FMIS berupa web untuk memudahkan proses penyusunan APBD. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah dibekali SIMDA FMIS pada tahun 2021, dan mulai diterapkan pada tahun 2022 (Suci, 2022). Namun, pada saat implementasi, SIMDA mengalami permasalahan sistemik yang membatasi akses pengguna terhadap sistem.

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran SIMDA sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat permasalahan tersebut. Pembaruan yang dilakukan pemerintah menjadi SIMDA FMIS tampaknya menimbulkan sejumlah tantangan yang tidak terduga, dan masih banyak perubahan yang harus dilakukan. Penyesuaian tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan hingga proses realisasi anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dapat digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam Pengelolaan Anggaran menggunakan SIMDA FMIS. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Transformasi Pengelolaan Anggaran Di Pemerintah Daerah Melalui Implementasi SIMDA FMIS (Studi Kasus Di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Transformasi Pengelolaan Anggaran dari SIMDA Keuangan Ke SIMDA FMIS di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Transformasi Pengelolaan Anggaran dari SIMDA Keuangan ke SIMDA FMIS di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan mengenai SIMDA FMIS, faktor pendukungnya dan kualitas informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan SIMDA FMIS.
2. Memperluas pengetahuan tentang *upgrade* software melalui penggunaan aplikasi SIMDA FMIS.

b. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

1. Dapat dijadikan gambaran dalam meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik di masa depan.
2. Sebagai pertimbangan penting dalam efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi SIMDA FMIS dan peningkatan penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi otonomi daerah.

3. Dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang aplikasi SIMDA FMIS dan memberikan alternatif solusi terhadap suatu permasalahan pada aplikasi SIMDA FMIS.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi yang dapat memberikan gambaran kepada peneliti lain yang ada hubungannya dengan penelitian tugas akhir ini.

1.5 Batasan Masalah

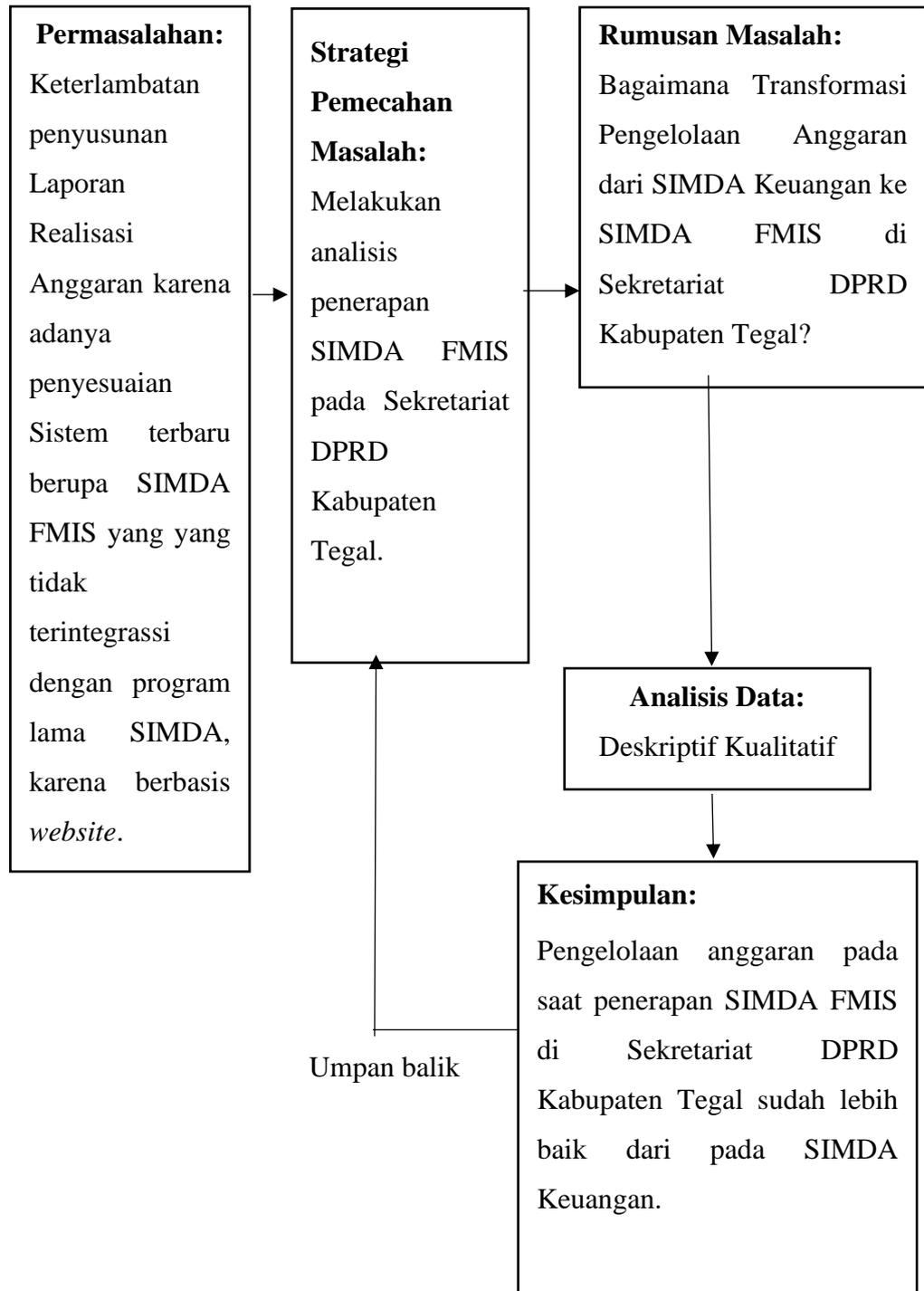
Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini hanya mengacu pada penerapan penggunaan aplikasi SIMDA FMIS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

1.6 Kerangka Berfikir

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tepat, akurat, transparan dan *akuntable* perlu adanya penerapan SIMDA FMIS. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terbitnya PP NO 71 TAHUN 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta penerapan program aplikasi SIMDA FMIS maka penyusunan laporan keuangan dapat lebih mudah dan tertata. Sekretariat DPRD mulai menerapkan SIMDA FMIS pada tahun 2022, namun berdasarkan hasil observasi terdapat permasalahan yaitu Perubahan dari SIMDA Keuangan menjadi SIMDA FMIS dapat memengaruhi penyerapan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, serta sering

terjadi sistem *error* pada sistem sehingga terjadi keterlambatan dalam mengentry data keuangan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti berniat untuk melihat lebih dalam bagaimana penyerapan realisasi anggaran setelah penerapan SIMDA FMIS dan bagaimana cara yang efektif untuk menangani permasalahan pada saat penggunaan SIMDA FMIS. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Pendekatan terstruktur diterapkan untuk membuat tugas akhir ini jelas dan memberi pembaca pemahaman yang luas. Berikut ini struktur sistematis dari tugas akhir:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir, halaman persetujuan publikasi akademik, persembahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran. Bagian ini dirancang untuk memudahkan pembaca menemukan bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori yang berkaitan dengan topik yang dipilih dalam penelitian yaitu mengenai laporan keuangan daerah, *Financial Management Information System (FMIS)* dan penelitian terdahulu sebagai sumber dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang lokasi penelitian (nama instansi dan alamat tempat penelitian), jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang garis besar dan inti dari penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi dan bagi pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran ini berisi data yang mendukung penelitian Tugas Akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir Lampiran

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian, buku bimbingan, spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Bagian akhir lampiran dapat juga berupa gambar, perhitungan-perhitungan, grafik,

atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.